

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntansi Keuangan

1. Pengertian Akuntansi Keuangan

Menjelaskan bahwa akuntansi keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh atau menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Kesimpulannya adalah cara bagaimana memperoleh, menggunakan, dan mengelola asset perusahaan.¹⁵

Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi disebut laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk tujuan umum maupun untuk tujuan khusus. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum. Penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan ditunjukkan kepada pihak eksternal, merupakan bagian dari akuntansi keuangan.

Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal beragam pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusunan laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi

¹⁵ Alexander, "Analisis Penerapan Akuntansi Leasing Pada PT. Fendral International Finance Manado", Jurnal EMBA, Vol.3 No.2 , 2015, hal. 521-522

dalam proses penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun berdasarkan data dan informasi yang telah terjadi sehingga lebih berorientasi pada data historis.

Di dalam Al-Qur'an berisi perintah praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini merupakan ayat yang paling jelas membahas praktek akuntansi, terdapat beberapa lafadz yang berakar dari kata mencatat (كتب) dalam ayat tersebut, sedangkan mencatat merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi. Salah satu ayat tersebut terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 282¹⁶, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئُتَىٰ بِالْعَدْلِ، وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ، فَإِلَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، وَلَا يَأْبَا الشُّهَدَاءُ إِذَا دُعُوا، وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ، فَسَوْقَ بِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), hal. 70

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁷

2. Tujuan

Laporan keuangan dapat disusun untuk tujuan khusus misalnya laporan keuangan yang ditujukan untuk perpajakan, regulator lain seperti Bank Indonesia (Untuk Perusahaan Bank), Departemen Keuangan (untuk perusahaan lembaga keuangan non bank). Laporan keuangan untuk tujuan khusus disusun mengikuti aturan spesifik dari regulator atau sesuai dengan kebutuhan khusus pemakainya. Secara umum tujuan laporan keuangan untuk:

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,...hal. 70

- a. Memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggung jawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- c. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
- d. Menyediakan pengaruh keuangan dari keterjadian dimasa lalu.

1. Jenis Laporan Keuangan

Informasi yang dihasilkan dalam akuntansi disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Salah satu bentuk prinsip akuntansi yang berlaku umum dan saat ini laporan keuangan yang dihasilkan menurut PSAK 1 adalah sebagai berikut:

a. Laporan posisi keuangan

Merupakan daftar yang sistematis dari aset, utang dan modal pada tanggal tertentu, yang biasanya dibuat pada akhir tahun. Disebut sebagai daftar yang sistematis, karena disusun berdasarkan urutan tertentu. Dalam laporan posisi keuangan dapat diketahui berapa jumlah kekayaan entitas, kemampuan entitas membayar kewajiban serta kemampuan entitas memperoleh tambahan pinjaman dari pihak luar. Selain itu juga dapat diperoleh tentang jumlah utang entitas. Kepada kreditor dan jumlah investasi pemilik yang ada di dalam entitas tersebut.¹⁸

¹⁸ Ati Retna Sari dkk, *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*, (Jakarta Mitra Media 2017), hal 4-5

b. Laporan rugi laba komprehensif

Merupakan ikhtisar mengenai pendapatan dan beban suatu entitas untuk periode tertentu, sehingga dapat diketahui laba yang akan diperoleh dan rugi yang dialami.

c. Laporan arus kas

Dengan adanya laporan ini pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan aset neto entitas, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan entitas untuk menghasilkan kas di masa mendatang.

d. Laporan perubahan ekuitas

Merupakan laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu, bisa satu bulan atau satu tahun. Melalui laporan perubahan modal, pembaca laporan dapat mengetahui sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu.

e. Catatan atas laporan keuangan

Merupakan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam empat laporan diatas. Laporan ini memberikan penjelasan atau rincian pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.¹⁹

f. Standar akuntansi keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan

¹⁹ Ati Retna Sari dkk, *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*,...hal 5-8

beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menyusun laporan keuangan ini diperlukan standar akuntansi.

Penyusunan tidak mungkin untuk menjelaskan kepada pihak eksternal cara asumsi dan konsep-konsep dasar penyusunan laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan perlu untuk membandingkan kinerja antar entitas, dalam penyajian dapat memudahkan pemakai dalam membaca dan menganalisis. Standar berfungsi memberikan acuan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam. Manajemen lebih mudah menyusun laporan keuangan karena pedoman memberikan ketentuan cara penyusunan tersebut.

Standar akuntansi berisikan pedomaan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi terdiri atas kerangka konseptual berisikan tujuan, komponen laporan keuangan, karakteristik kualitatif dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan, pernyataan standar akuntansi (PSAK) berisikan pedoman untuk penyusunan laporan, pengaturan transaksi atau kejadian, dan komponen tertentu dalam laporan keuangan. Pengaturan terkait komponen laporan keuangan secara umum berisikan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.²⁰

Saat ini, hanya dua standar akuntansi yang banyak dijadikan referensi atau adopsi di dunia yaitu *International Financial Reporting Standard* (IFRS) dan *US-Generally Accepted Accounting Principles* (US-GAAP). IFRS disusun oleh

²⁰ Ati Retna Sari dkk, *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*,...hal 9

International Accounting Standard Board (IASB) sedangkan US-GAAP disusun oleh *Financial Accounting Standard Board* (FASB). Perkembangan terakhir menunjukkan keinginan untuk menyusun satu standar akuntansi yang berkualitas secara internasional semakin menguat. Banyak Negara melakukan adopsi penuh IFRS untuk dijadikan standar lokal yang berlaku di negaranya. Saat ini, sedang terjadi proses penyesuaian antara IFRS dan US-GAAP sehingga semakin sedikit perbedaan antara keduanya.

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas empat standar, sering disebut dengan 4 pilar standar akuntansi yaitu standar akuntansi keuangan (SAK), standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP), standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah), dan standar akuntansi keuangan pemerintah (SAP).²¹

Rerangka Konseptual Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan. Rerangka konseptual berisi konsep-konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang merupakan bagian yaitu tujuan, asumsi, karakteristik, definisi dan kriteria yang mengatur pelaporan keuangan. Oleh karena itu, rerangka ini sering disebut sebagai rerangka konseptual. Di Indonesia rerangka konseptual dikenal dengan sebutan Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan (KDPPLK). Namun, di beberapa penelitian dan sumber buku akuntansi keuangan banyak menggunakan istilah rerangka sebagai pembeda dengan kerangka tubuh makhluk hidup atau rancangan bangunan.

²¹ Ati Retna Sari dkk, *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK....*,hal 10-11

Reranga konseptual menjelaskan elemen-elemen laporan keuangan sebagai berikut:

a. Aset (*Asset*).

Aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari aset tersebut diharapkan ada manfaat ekonomi masa depan yang mengalir ke dalam entitas pada masa yang akan datang.

b. Liabilitas (*Liabilities*).

Liabilitas merupakan kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya suatu entitas.

c. Ekuitas (*Equity*).

Ekuitas merupakan kepentingan sisa dalam aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas.

d. Penghasilan (*Income*).

Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi dalam periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari kontribusi dari pemegang saham.²²

Akuntansi keuangan berfokus pada pengembangan dan komunikasi informasi keuangan kepada pemakai eksternal. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan, sering kali perusahaan tersebut

²² Ati Retna Sari dkk, *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*,...hal 22-23

membutuhkan kas yang lebih banyak dari pada yang disediakan dari laba usaha. Dalam situasi ini, perusahaan beralih kepada orang atau organisasi eksternal untuk mendapatkan pendanaan. Para pemakai eksternal ini membutuhkan jaminan bahwa untuk mendapatkan hasil dari investasi mereka. Maka, mereka membutuhkan informasi tentang kinerja perusahaan dimasa lalu karena informasi ini akan memungkinkan mereka memprediksi bagaimana kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.

4. Pemakai Laporan Keuangan

Siapakah yang menggunakan informasi akuntansi dan informasi apa yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengambilan keputusan? Secara umum, semua pihak yang berkepentingan dengan kesehatan keuangan suatu perusahaan disebut dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan yang menggunakan informasi akuntansi biasanya dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi utama:

1. Pemakai internal, yaitu pengambil keputusan yang secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan internal perusahaan.
2. Pemakai eksternal, pengambil keputusan yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan perusahaan.²³

²³ Ati Retna Sari dkk, *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*,...hal 23

5. Tahap Pencatatan

1. Menganalisis Dokumen Keuangan.

Analisis dokumentasi aktivitas perusahaan menjadi dasar untuk pencatatan awal setiap transaksi.

2. Mencatat Transaksi

Berdasarkan dokumen pendukung ada tahap 1, transaksi dicatat dengan menggunakan ayat jurnal secara kronologis pada buku jurnal.

3. Memindah bukukan (posting) transaksi.

Transaksi yang telah dikelompokkan dan dicatat pada jurnal, di-*posting* dalam akun-akun yang sesuai.

6. Tahap Pelaporan

1. Menyiapkan Neraca Saldo atau Percobaan atas akun-akun di buku besar.

Neraca saldo bersisi daftar setiap akun pada buku besar bersama saldo debit dan kreditnya. Tahap ini memungkinkan pengecekan umum atas keakuratan pencatatan dan pemindah bukuan.

2. Mencatat Jurnal Penyesuaian

Sebelum laporan keuangan disiapkan, semua informasi relevan yang belum tercatat harus diidentifikasi dan dibuatkan penyesuaian yang tepat. Jurnal penyesuaian harus dicatat dan di *posting*, sehingga akun-akun berada pada saldo yang benar sebelum laporan keuangan disiapkan.²⁴

²⁴ Ati Retna Sari dkk, *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*,...hal 25

3. Menyiapkan Laporan Keuangan.

Laporan ini merupakan ikhtisar hasil operasi dan menunjukkan posisi keuangan serta arus kas yang disiapkan berdasarkan informasi yang didapat dari akun yang telah disesuaikan.

4. Menutup Akun Nominal.

Saldo akun-akun nominal (sementara) ditutup ke akun laba ditahan. Proses penutupan ini mengakibatkan semua akun nominal bersaldo nol (0) pada awal periode berikutnya.

5. Menyiapkan Neraca Saldo Setelah Penutupan.

Untuk memastikan kesamaan atau keseimbangan debit dan kredit setelah jurnal penyesuaian dan jurnal penutup di posting.²⁵

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis. Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi disebut laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan ditujukan kepada pihak eksternal, merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Bidang akuntansi keuangan dilihat dari sisi pengguna informasi dibagi menjadi dua yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan.

Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar

²⁵ Ali Akbar, *Akuntansi keuangan* (Jakarta: Salemba Empat 2009), hal 63-64

akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).²⁶

B. Piutang

1. Pengertian Piutang

Menurut Hery piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit. Sebagian besar piutang timbul dari penyerahan barang dan jasa secara kredit kepada pelanggan. Tidak dapat dipungkiri bahwa umumnya pelanggan akan menjadi lebih tertarik untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan secara kredit oleh perusahaan (penjual), dan hal ini rupanya juga menjadi salah satu trik bagi perusahaan untuk meningkatkan besarnya omset penjualan yang akan tampak dalam laporan laba ruginya. Piutang yang timbul dari penjualan atau penyerahan barang dan jasa secara kredit ini diklasifikasikan sebagai piutang.²⁷

Menurut Ati Retna Sari piutang adalah tuntutan kepada pelanggan dan pihak lain untuk memperoleh uang, barang dan jasa (*aset*) tertentu pada masa yang akan datang sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Piutang akan menimbulkan aliran kas masuk dimasa yang akan datang. Piutang harus diklasifikasikan sebagai aset lancar jika pengumpulan piutang

²⁶ Dwi Martani dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta:Salemba Empat, 2012), hal.8

²⁷ Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah 1*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal. 265

diharapkan dapat dilakukan dalam periode kurang dari satu tahun atau satu siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama.²⁸

Menurut Iman Santoso piutang merupakan salah satu unsur terpenting dalam aktiva lancar karena biasanya hanya membutuhkan satu tahapan lagi untuk dapat dikoversikan menjadi kas. Karena itu perlu kiranya untuk dilakukan manajemen piutang yang baik sebelum piutang tersebut sampai terja di pencairan, yang artinya sebelum kredit disetujui dan diberikan haruslah dicapai suatu tingkat kualitas yang tinggi sehingga penagihan dan pengumpulannya dapat dilakukan tepat pada waktunya. Dengan demikian kerugian kegiatan penagihan dan kerugian akibat piutang yang tidak dapat dicairkan dapat ditekan seminimal mungkin. Untuk mencapai tujuan ini maka perlu diciptakan pengendalian internal atas piutang yang cukup memadai.²⁹

Menurut pontoh piutang merupakan sebuah hak tagih dari sebuah organisasi (dalam hal ini perusahaan) atas sejumlah uang tunai dimasa yang akan datang yang disebabkan karena transaksi masa kini. Piutang merupakan klaim uang, barang atau jasa perusahaan kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya.³⁰

Menurut Rizal Effendi piutang secara umum dapat diartikan sebagai aset perusahaan yang ada pada pihak lain akibat adanya transaksi penjualan barang

²⁸ Ati Retna Sari dkk, *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*, (Jakarta Mitra Media 2017), hal. 85

²⁹ Iman Santoso, *Akuntansi Keuangan Menengah-Buku Satu* (Bandung PT Refika Aditama, 2007), hal. 199

³⁰ Runtuwene, "Penerapan Akuntansi Piutang Leasing Untuk Perencanaan dan Pengendalian Pada PT Suzuki Finance Indonesia Cabang Manado", *Jurnal EMBA*, Vol.1, No. 1, 2013, hal. 999

jasa atau transaksi lainnya pada masa lalu, yang akan diterima pada masa yang akan datang.³¹

Dari kesimpulan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwasanya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dengan dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara kredit atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya.

Dalam praktik, piutang pada umumnya diklasifikasikan menjadi berikut ini:

a. Piutang usaha

Piutang Usaha adalah jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang usaha memiliki saldo normal disebelah debet sesuai dengan saldo normal untuk aktiva. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, biasanya dalam waktu 30 hingga 60 hari. Setelah ditagih, secara pembukuan, piutang usaha akan berkurang di sebelah kredit.³²

b. Piutang wesel

Piutang Wesel adalah tagihan perusahaan kepada pembuat wesel. Pembuat wesel disini adalah pihak yang telah berhutang kepada perusahaan, baik melalui pembelian barang atau jasa secara kredit maupun melalui

³¹ Rizal Effendi, *Accounting Principles:Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014), hal.205

³² Rizal Effendi, *Accounting Principles:Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*,...hal.206

peminjaman sejumlah uang. Pihak yang berutang berjanji kepada perusahaan (selaku pihak yang diutangkan) untuk membayar sejumlah uang tertentu berikut bunganya dalam kurun waktu yang telah disepakati. Janji pembayaran tersebut ditulis secara formal dalam sebuah wesel atau promes. Perhatikan baik baik bahwa piutang wesel mengharuskan debitur untuk membayar bunga.³³

c. Piutang lain-lain

Piutang lain-lain umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah dalam neraca. Contohnya adalah piutang bunga, piutang deviden (tagihan kepada *investe* sebagai hasil atas investasi), piutang pajak (tagihan perusahaan kepada pemerintah berupa restitusi atau pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak), dan tagihan kepada karyawan.³⁴

Jika piutang dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun atau sepanjang siklus normal operasional perusahaan, yang mana yang lebih lama, maka piutang lain-lain ini akan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Di luar itu, tagihan akan dilaporkan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Siklus operasional perusahaan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan mulai dari pembelian barang dagangan dari pemasok, menjualnya kepada pelanggan secara kredit sampai pada diterimanya penagihan piutang usaha atau piutang dagang. Piutang lain-lain memiliki saldo normal disebelah debet dan akan berkurang disebelah kredit.³⁵

³³ Rizal Effendi, *Accounting Principles: Prinsip-Prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*,...hal. 206

³⁴ *Ibid.*, hal 207

³⁵ Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah 1*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hal 266-267

2. Penilaian piutang

Pada prinsipnya, piutang dapat diakui sebesar nilai bruto pengorbanan yang menjadikan timbulnya piutang atau sebesar nilai moneter yang diperjanjikan oleh pihak debitur dan kreditur. Nilai bruto piutang usaha dapat direkam sebesar nilai transaksi penjualan yang tertulis dalam faktur. Dalam transaksi piutang yang berasal dari aktivitas meminjamkan uang, maka nilai bruto piutang dapat direkam sebesar nilai pengeluaran uang dari bukti untuk transaksi tersebut.

Dalam praktinya tidak semua piutang dapat direalisasikan menjadi kas. Hal ini bisa disebabkan salah menilai calon debitur, kondisi usaha debitur yang menurun, atau karena faktor alam yang diluar kendali manusia. Untuk menyajikan informasi akuntansi yang realistis, maka perusahaan dapat menghapuskan piutang-piutang yang diyakini, atau bahkan yang diragukan kemungkinannya untuk dapat ditagih.

Untuk memenuhi standar kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, maka kualitas piutang juga harus dinilai kembali. Dengan demikian nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan dapat berbeda dari saldo piutang berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

Berkaitan dengan hal ini, maka piutang dalam laporan keuangan dapat disajikan sebesar nilai bersih yang berasal dari saldo nilai bruto setelah dikurangi dengan penghapusan atau penyisihan piutang tak tertagih.³⁶

³⁶ Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah 1*, hal..., 266-267

3. Penghapusan Piutang

Piutang merupakan aktiva perusahaan yang penguasaan fisik uangnya berada pada pihak debitur. Karena berbagai faktor, kemampuan keuangan tiap debitur berfluktuasi dari waktu ke waktu. Dalam kondisi demikian piutang mengandung resiko ketidak pastian pelunasan dari debiturnya. Manajemen perusahaan tidak dapat memastikan bahwa semua piutang dapat direalisasikan kembali menjadi kas.³⁷

Kadaan ini menyebabkan informasi piutang tidak akan realistis jika secara penuh jumlahnya disajikan dalam neraca. Manajemen harus menghitung dengan cara yang paling mendekati jumlah piutang yang dapat diterima kembali dalam bentuk kas. Akuntansi piutang menyediakan metode penghapusan piutang untuk menaksir jumlah piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Jumlah ini selanjutnya dikurangkan dari total piutang sehingga saldo piutang dapat disajikan secara riil dalam laporan keuangan.

Piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih akan ditampung dalam rekening penyisihan piutang yang tidak tertagih. Piutang yang secara jelas meyakinkan bahwa tidak dapat ditagih lagi dikategorikan sebagai piutang yang dihapuskan. Hasil pengurangan nilai bruto piutang dengan piutang tak tertagih debitur nilai bersih piutang.

Secara legal dan operasional perusahaan, penghapusan piutang menurut akuntansi tidak menghilangkan hak kreditor untuk melakukan penagihan.

³⁷ Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah 1*, hal..., 267-268

Sebagai debitur juga tidak kehilangan kewajiban untuk melakukan pembayaran atau pelunasan utang. Akuntansi penghapusan piutang dapat dilakukan dengan alternatif prosedur metode penghapusan langsung dan metode penghapusan tidak langsung.

a. Metode Penghapusan Langsung

Merupakan metode penghapusan piutang yang dapat diterapkan terhadap piutang yang secara meyakinkan tidak dapat ditagih lagi. Jika menggunakan metode ini, maka saat penghapusan piutang perusahaan dapat membuat jurnal dengan mendebet beban kerugian dan mengkredit jumlah piutang yang dihapuskan.

b. Metode tidak langsung atau metode cadangan

Jika menggunakan metode cadangan dalam penghapusan piutang, maka piutang tertentu dapat dihapuskan dalam pembukuan sekalipun sejumlah piutang belum dipastikan kemungkinan tidak tertagihnya. Dengan metode ini bahkan piutang yang dihapuskan hanya didasarkan pada estimasi jumlah tertentu dan nama pelanggan yang dihapuskan piutangnya juga tidak dapat diidentifikasi satu persatu.

Estimasi piutang tak tertagih dapat didasarkan pada presentase dari penjualan atau presentase dari piutang berdasarkan rata-rata pengalaman sebelumnya. Yang menjadi patokan umum bahwa presentase piutang yang dihapuskan umumnya lebih besar terhadap piutang-piutang yang berumur lebih lama.³⁸

³⁸ L.M.Samryn, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015) hal. 61-64

4. Proses Terjadinya Piutang

Pada umumnya piutang timbul ketika sebuah perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit dan berhak atas penerimaan kas di masa mendatang, yang prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan, melakukan pengiriman barang atau peminjaman dana, melakukan penagihan, dan akhirnya menerima pembayaran, dengan kata lain piutang dapat juga timbul ketika perusahaan melakukan suatu jasa atau transaksi lain yang menciptakan suatu hubungan dimana satu pihak berutang kepada yang lain seperti memberi pinjaman kepada konsumen atau dalam hal ini perusahaan melakukan pembiayaan atas barang dan jasa yang dibeli konsumen.

Piutang merupakan salah satu elemen paling penting dalam modal kerja suatu perusahaan, Sebagian piutang dapat dimasukkan dalam modal kerja suatu perusahaan. Sebagian piutang yang terdiri dari dana yang di investasikan dalam produk yang terjual dan sebagian lain yang termasuk modal kerja potensial yaitu bagian yang merupakan keuntungan.³⁹

Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja yaitu kas–persediaan – piutang – kas. Dalam keadaan normal dan dimana penjualan pada umumnya dilakukan dengan kredit, piutang mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi dari pada persediaan, karena perputaran dari piutang ke kas

³⁹ L.M.Samryn, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015) hal. 65

membutuhkan satu langkah, yang terpenting adalah adanya pengendalian piutang yang efektif dan memadai. Sistem prosedur yang dapat diandalkan dan juga sistem penagihan untuk menjamin penagihan piutang yang tepat pada waktunya dan mengurangi kerugian akibat piutang tak tertagih. Kerugian piutang juga dapat terjadi jika manajemen kurang baik dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan piutang. Sebelum terjadinya piutang perusahaan *leasing* membuat sistem dan prosedur terjadinya piutang mulai dari terjadinya penjualan kredit sampai piutang tersebut dikelola oleh pihak manajemen perusahaan agar pengendalian dan pengelolaan piutang dapat dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan.⁴⁰

5. Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir, prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit yang berisi antara lain :

⁴⁰ Rahmat Mulyana Dali dan Reza Ramdhani, *Analisis Sistem Pengendalian atas Piutang dalam Meningkatkan Efektifitas Penerimaan Kas pada PT Benteng Sinergis Multifinance*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4, No. 5 2015, hal. 77

latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, jaminan kredit.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

c. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas berkas tersebut sesuai dengan lengkap seperti dengan yang perusahaan inginkan.

d. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.⁴¹

⁴¹ Dhullo Affandi, "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dengan Menggunakan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Bank Sulutgo", Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Vol.2, No.1, 2017, hal. 115

C. Perusahaan *Leasing*

1. Pengertian perusahaan *Leasing*

Menurut PSAK *leasing* merupakan suatu sewa guna usaha diklasifikasikan sebagai pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan asset. Pengertian *leasing* dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006, Miranda Masihin Sewa Guna Usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa opsi (*operating lease*) untuk digunakan penyewa guna usaha selama jangka waktu terpenuhi berdasarkan pembayaran secara angsuran.⁴²

Menurut OJK Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan atau usaha Kartu Kredit.⁴³ Kegiatan Usaha meliputi:

- a. Sewa guna usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) maupun Sewa Operasional (*Operating Lease*)
- b. Anjak piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

⁴² Tulangow dkk, "Evaluasi Penerapan Akuntansi Piutang *Leasing* dan Pelaporan Pada PT. Astra Sedaya Finance di Mando", Jurnal Riset Akuntansi, Vol.4, No.3, 2017, hal.1013

⁴³ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx> diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 14:00 WIB

- c. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang /atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- d. Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen (pembiayaan kendaraan bermotor) dengan pembayaran secara angsuran.⁴⁴

2. Dasar Hukum *Leasing*

Pranata Hukum Sewa Guna Usaha (*Leasing*) baru mulai diatur secara khusus untuk pertama kalinya dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia pada tahun 1974. Beberapa peraturan di tahun 1974 tersebut merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum *Leasing* di Indonesia, peraturan-peraturan tersebut adalah:

- a. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: Kep-122MK/IV/2/1974, Nomor : 32/M/SK/2/1974, Nomor : 30/Kpb/I/74, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*.
- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep .649/MK/IV/5/1974, tanggal 6 Mei 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*.
- c. Surat Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.650/MK/IV/5/1974, tanggal 6 Mei 1974 tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan Besarnya Bea Materai Terhadap Usaha *Leasing*.

⁴⁴ Muhamad Abdul Kadir, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 56

- d. Pengumuman Direktur Jenderal Moneter Nomor: Pen307/DJM/III.1/7/1974, tanggal 8 Juli 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan *Leasing*.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Moneter dalam Negeri no : SE499/MD/1984 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyampaian Laporan Perusahaan *Leasing*
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Moneter dalam Negeri no: SE-4835/MD/1983 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Perusahaan *Leasing*.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 834/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan *Leasing*).⁴⁵

Leasing sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi di bidang bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber utama hukum Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber utama hukum Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dari segi publik.

Dengan demikian dasar hukum *leasing* dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu dari segi perdata dan dari segi publik.

1. Segi Hukum Perdata

⁴⁵ Muhamad Abdul Kadir, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan...*, hal. 57

Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga leasing, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, terutama *lessee*. Dengan demikian, kehendak pihak-pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam hubungan hukum *leasing*. Dalam perundang-undangan juga diatur mengenai kewajiban dan hak pihak-pihak dan hanya akan berlaku sepanjang pihak-pihak tidak menentukan lain secara khusus dalam perjanjian yang dibuat. Dengan demikian, ada 2 (dua) sumber hukum perdata yang mendasari *leasing*, yaitu asas kebebasan berkontrak dan undang-undang bidang hukum perdata.⁴⁶

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam perjanjian *leasing*, perjanjian selalu dibuat tertulis sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian *leasing* dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban *lessor* sebagai Perusahaan Pembiayaan (*Finance Company*) dan *lessee* sebagai perusahaan atau perorangan yang dibiayai. Perjanjian *leasing* dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat

⁴⁶ Muhamad Abdul Kadir, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan...*, hal. 58

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

a) Perjanjian Sewa-Menyewa

Perjanjian *leasing* tergolong ke dalam perjanjian sewa-menyewa karena objeknya adalah barang khusus berupa barang modal, yang juga termasuk menjadi objek sewa-menyewa. Selain itu, kedua belah pihak juga berstatus khusus sebagai Perusahaan Pembiayaan (*lessor*) dan perusahaan pengguna barang modal (*lessee*), yang juga termasuk dalam pengertian pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Mengenai perjanjian sewa-menyewa ada diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1580 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut juga berlaku dalam perjanjian *leasing*, kecuali jika dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang dari peraturan tersebut.⁴⁷

b) Segi Perdata di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ada juga ketentuan-ketentuan dalam berbagai Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur aspek perdata *leasing*. Undang-Undang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berlakunya Undang-Undang ini apabila perusahaan *leasing* hukum berbentuk koperasi, sehingga di dalam pendirian dan kegiatan juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU tersebut.

⁴⁷ Muhamad Abdul Kadir, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan...*, hal. 59

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-Undang ini apabila perusahaan *leasing* berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT).
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan-ketentuan pokok agraria, dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-Undang ini apabila *leasing* mengadakan perjanjian mengenai hak-hak atas tanah serta pendaftarannya.
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-Undang ini apabila *lessor* melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan Undang-Undang yang secara perdata merugikan konsumen (*lessee*).⁴⁸
3. Segi Hukum Publik.

Sebagai usaha yang berkiprah di bidang jasa pembiayaan, *leasing* banyak menyangkut kepentingan publik, terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, *leasing* banyak diatur dalam berbagai bentuk Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Negara.

a. Undang-Undang Bidang Hukum Publik

Berbagai Undang-Undang bidang Administrasi Negara yang menjadi sumber utama *leasing* adalah sebagai berikut :

⁴⁸ Muhamad Abdul Kadir, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan....*, hal. 60

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-Undang ini apabila *leasing* berurusan dengan pendaftaran, pendaftaran ulang, dan pendaftaran likuidasi perusahaan.
- b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-Undang ini apabila *leasing* berhubungan dengan bank.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-Undang ini karena *Leasing* membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan jenis pajak lainnya.⁴⁹
- d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-

⁴⁹ Muhamad Abdul Kadir, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*,....hal. 60

Undang ini karena *leasing* wajib melakukan pembukuan perusahaan dan pemeliharaan dokumen perusahaan.

- e) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya Undang-Undang ini apabila *lessor* melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan Undang-Undang yang secara perdata merugikan konsumen (*lessee*).

Pertaturan tentang Lembaga yang mengatur Sewa Guna Usaha antara lain adalah :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang diantaranya memuat tentang kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan (pasal 2 – pasal 6), tata cara pendirian (pasal 7 – pasal 13), kepemilikan dan kepengurusan (pasal 14-pasal 20), Merger, Konsolidasi dan Akuisisi (pasal 21), sanksi (pasal 44).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Yang diantaranya memuat tentang prinsip mengenal nasabah (pasal 2- pasal 12), pelaksanaan dan fasilitas pendukung (pasal 13-pasal 16), sanksi pasal (18).⁵⁰

⁵⁰ Idham, *Analisis Hukum tentang Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2016) hal. 53-55

4. Pemasaran

a. Syarat Kredit Mudah dan Cepat

Saat ini seluruh perusahaan pembiayaan berlomba-lomba untuk memberi kemudahan untuk mengajukan kredit. Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan kredit saat ini bahkan hanya perlu KTP dan NPWP.

b. Bermitra dengan Banyak Toko

Tenaga penjual dari perusahaan pembiayaan berupaya menguasai pusat perbelanjaan atau event, dengan mendirikan booth atau outlet didalamnya. Dengan demikian, konsumen yang ingin membeli produk, berpeluang untuk dibiayai perusahaan pembiayaan tersebut. Semakin banyak pusat perbelanjaan dan event yang dikuasai, akan semakin banyak peluang bagi perusahaan pembiayaan tersebut untuk menyalurkan kreditnya.⁵¹

c. Persetujuan Kredit yang Cepat

Dengan system dan mekanisme tertentu, saat ini perusahaan-perusahaan pembiayaan telah membuat formulasi agar persetujuan kredit dapat dilakukan dengan cepat, tanpa mengabaikan unsur kehati-hatian dalam kadar toleransi yang aman. Dengan sebuah system, saat ini bahkan ada perusahaan pembiayaan yang hanya membutuhkan waktu 30 menit, customer sudah bisa mengetahui hasil pengajuan kreditnya disetujui atau tidak.

⁵¹ Idham, *Analisis Hukum tentang Lembaga Pembiayaan, ...*hal. 56

d. Reminder Due

Salah satu tugas penting setelah pembelian adalah mengingatkan tanggal jatuh tempo kepada nasabah. Hal ini dapat dilakukan oleh system yang akan memberi informasi melalui SMS atau Whatsapp. Bisa juga dilakukan oleh seorang petugas mengingatkan dengan cara menelfon ke nasabah, 1-7 hari sebelum jatuh tempo. Tujuannya agar nasabah tidak telat membayar sehingga terhindar dari denda keterlambatan. Reminder due juga dapat mencegah tingginya rasio kredit bermasalah/kredit mecet.⁵²

e. Asuransi

Dengan program asuransi, nasabah menjadi tenang karena perusahaan asuransi yang akan menanggung risiko apabila hal terburuk harus dialami pada produk tersebut. Untuk produk kendaraan bermotor misalnya, proteksi yang diberikan perlindungan minimal 75% dari kerusakan motor tersebut karena terjadi kecelakaan.

f. Menguasai Produk

Selain masalah system penjualan, sisi sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan nasabah juga harus ditingkatkan kompetensinya, antara lain; dengan menguasai kredit yang bisa ditawarkan, produk yang akan dijual dan kemampuan berkomunikasi dengan baik.⁵³

⁵² Idham, *Analisis Hukum tentang Lembaga Pembiayaan, ...* hal. 53-55

⁵³ Ibid., hal 55-56

5. Keuntungan Sewa Guna Usaha

Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan memerlukan aset tetap dan untuk memperolehnya perusahaan dapat menggunakan dengan berbagai macam cara. Selain dengan pembelian, salah satu cara yang dapat diterapkan adalah menggunakan sewa guna usaha (*leasing*). Pengertian sewa guna usaha menurut Pernyataan Standar Akuntansi keuangan NO. 30 merupakan suatu perjanjian dimana pemilik aset/ yang menyewakan (*lessor*) memberikan hak kepada pengguna aset/penyewa (*lessee*) untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang telah disepakati. Sebagai imbalanya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*.⁵⁴

Perjanjian sewa guna usaha mengalami perkembangan yang cukup pesat karena memiliki keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

- a. Penghematan modal, yaitu tidak memerlukan dana yang besar uang muka yang jumlahnya biasanya tidak besar. Hal ini merupakan penghematan modal bagi pihak penyewa sehingga penyewa dapat menggunakan modal yang tersedia untuk keperluan lainnya. Karena sewa guna usaha umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan.
- b. Menghindari resiko kepemilikan, seperti kerusakan, perubahan kondisi ekonomi, dan kemerosotan fisik dari aktiva tetap yang ingin dimiliki.

⁵⁴ Idham, *Analisis Hukum tentang Lembaga Pembiayaan, ...* hal. 57

Semua resiko ini dapat dihindari jika aktiva tersebut diperoleh dengan perjanjian sewa guna usaha.

- c. Fleksibilitas, meliputi inovasi dan perubahan teknologi, struktur kontraknya, besarnya pembayaran, maupun jangka waktu pembayaran.⁵⁵
- d. Sewa guna usaha sesuai dengan kebutuhannya dapat dibukukan dengan *on* atau *off balance sheet*. Di Indonesia, untuk keperluan perhitungan pajak menggunakan *off balance sheet*.
- e. Hubungan bisnis yang berkelanjutan antara pihak *lessee* dan *lessor* selama periode waktu yang telah ditentukan.⁵⁶

Sedangkan bagi perusahaan sewa guna usaha (*lessor*) memperoleh keuntungan dari menyewa guna usahakan aktiva dari pada menjualnya. Karena beberapa alasan, diantaranya:

- a) Dapat meningkatkan penjualan.
 - b) Keringanan pajak.
 - c) Kelangsungan hubungan dengan penyewa guna usaha.
 - d) Nilai sisa dipertahankan⁵⁷
6. Jenis-Jenis Akuntansi *leasing* dibagi menjadi dua kelompok besar
- a. *Capital Lease (Lease Modal)*

Jika kontrak *lease* mensinyalir adanya perpindahan aset dari *lessor* ke *lessee* dianggap sebagai *Capital Lease*. *Capital lease* (Sewa guna usaha

⁵⁵ Idham, *Analisis Hukum tentang Lembaga Pembiayaan...*, hal 57

⁵⁶ Hery dan Widyawati Lekok, *Akuntansi keuangan menengah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara 2013), hal. 170

⁵⁷ Iman Santoso, *Akuntansi Keuangan Menengah-Buku Dua*, (Bandung: PT Refika Aditama 2009) hal. 387-388

dengan hak opsi) Pada transaksi *leasing* jenis ini *lessee* yang membutuhkan barang menentukan barang sendiri. Jenis serta spesifikasi barang yang dibutuhkan. *Lessee* juga mengadakan negosiasi dengan *supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta lain-lain hal yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut.

Kemudian *Lessor* akan mengeluarkan dananya untuk membayar tersebut kepada *supplier* dan setelah itu barang tersebut diserahkan kepada *lessee*. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut maka *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Pada akhir masa *lease*, *lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut sebagai nilai sisanya, mengembalikan barang tersebut kepada *lessor* atau juga mengadakan perjanjian *leasing* lagi untuk tahap yang kedua atas barang yang sama.⁵⁸

b. *Operating Lease (Lease Operasi)*

Dianggap sebagai *operating lease* apabila perjanjian digolongkan sebagai perjanjian sewa, tidak ada perubahan kepemilikan. Pendapatan sewa *lease* diakui setiap tahun saat pembayaran *lease* ditagih. Pada transaksi *leasing* jenis ini, *lessor* membeli barang dan kemudian menyewakannya kepada *lessee* untuk jangka waktu tertentu.

⁵⁸ Iman Santoso, *Akuntansi Keuangan Menengah*-Buku Dua, (Bandung: PT Refika Aditama 2009), hal 397-398

Pada prakteknya lessee membayar uang secara berkala yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor. Disini secara jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi *lessee*. Setelah masa *lease* berakhir, *lessor* merundingkan kemudian dilakukannya kontrak *lease* yang baru dengan lessee yang sama atau juga lessor mencari calon lessee yang baru. Pada operating lease ini biasanya lessor bertanggung jawab mengenai perawatan barang tersebut. Barang-barang yang sering digunakan dalam operating lease ini biasanya barang-barang mempunyai nilai tinggi seperti alat-alat berat, traktor, mesin-mesin, dan sebagainya.⁵⁹

7. Pihak -Pihak yang Terlibat Dalam *Leasing*:

- a. *Lessor* merupakan pihak yang telah memberikan jasa pembiayaan kepada *lessee* dalam bentuk barang modal dengan cara *leasing*.
- b. *Lessee* merupakan perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.
- c. *Supplier* merupakan perusahaan atau pihak yang mengadakan ataupun menyediakan barang modal yang menjadi objek untuk dileasingkan kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.⁶⁰

⁵⁹ Runtuwene, "Penerapan Akuntansi Piutang *Leasing* Untuk Perencanaan dan Pengendalian Pada PT Suzuki Finance Indonesia Cabang Manado", Jurnal EMBA, Vol. 1, No. 1 2013, hal. 999

⁶⁰ Ibid., hal. 1002

D. PSAK No. 30 Tentang Sewa

1. Ruang Lingkup

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK No. 30 tentang Sewa pada tanggal 27 Agustus 2014. PSAK No. 30 memberikan pengaturan akuntansi yang meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan sewa.

Tujuan pernyataan ini adalah untuk mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi *lessee* maupun *lessor* dalam hubungannya dengan sewa. Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi untuk semua jenis sewa selain:

- a. Sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui.
- b. Perjanjian lisensi untuk hal-hal seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip (karya tulis), hak paten, dan hak cipta.

Namun demikian, di dalam PSAK No. 30 dikatakan bahwa pernyataan tersebut tidak diterapkan sebagai dasar pengukuran untuk:

- a. Properti yang dikuasai oleh lessee yang dicatat sebagai properti investasi (PSAK 13: Properti Investasi);
- b. Properti investasi yang diserahkan oleh lessor yang dicatat sebagai sewa operasi (PSAK 13);⁶¹

⁶¹ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Paragraf 8-38, Tahun 2012 (*Revisi*), hal. 31

2. PSAK No. 30 Tentang Penerapan Akuntansi Piutang *Leasing*

a. Perlakuan Akuntansi Piutang *Leasing* menurut PSAK 30

Perlakuan akuntansi *leasing* menurut PSAK adalah peraturan baku yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap penerapan Akuntansi di Indonesia adalah PSAK. Untuk penelitian ini, perlakuan akuntansi *leasing* tertulis di PSAK No.30.⁶²

Revisi 2012 yang isinya mengatur tentang sewa pembiayaan atau *leasing* dengan penerapannya sebagai berikut:

- a) “Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset”. (Paragraf : 08)
- b) “*Lessor* mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan dilaporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa netto tersebut”. (Paragraf : 35)
- c) “Pada hakikatnya dalam sewa pembiayaan seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan hukum dialihkan oleh *lessor* kepada *lessee*, dan dengan demikian penerimaan piutang sewa diperlakukan oleh *lessor* sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan yang

⁶² Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, ... hal. 32

diterima sebagai penggantian dan imbalan atas investasi dan jasanya”.(Paragraf:36)

- d) Pengukuran setelah pengakuan :”Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi netto *lessor* dalam sewa pembiayaan”. (Paragraf : 38)⁶³

Leasing sebagai suatu sarana alternatif untuk suatu pembiayaan banyak menunjang tujuan pemerintah dalam mengembangkan sektor swasta. Dalam hal ini terdapat dua jenis pembiayaan *leasing*, yaitu:

1. *Financial lease* memberikan hak opsi kepada peminjam untuk membeli barang tersebut setelah habis masa kontrak.
2. *Operating lease* hanya memberikan hak pakai saja dan setelah habis masa pakai barang modal tersebut dikembalikan. Untuk sistem *operating lease* biasanya pihak *lessor* bertanggungjawab terhadap perawatan barang modal tersebut. Jenis barang-barang modal tersebut yang banyak disewakan dalam sistem *operating lease* ini adalah barang-barang yang memiliki nilai yang tinggi, misalnya alat-alat berat, alat kontraktor dan mesin-mesin.

Cara seperti ini dimungkinkan perusahaan sebab setelah masa sewa habis, kemungkinan barang modal tersebut masih cukup berharga untuk disewakan lagi ataupun dijual. Untuk menghindari dari resiko kerugian yang besar karena

⁶³ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan,...hal. 33

suatu kecelakaan atau lain hal, maka dalam sistem *leasing* ini mensyaratkan suatu asuransi.

Premi asuransi tersebut dibayarkan oleh *lessee* dengan alasan bahwa *lessee* adalah pihak yang paling mengetahui bagaimana karakteristik dari barang modal tersebut. Berhubungan dengan hal tersebut, maka pihak *lessor* melakukan pengecekan atas kelangsungan asuransi barang modal yang merupakan milik *lessor*.⁶⁴

3. Pengakuan Awal dan Pengukuran Piutang Bagi Pihak *Lessee*

Menurut PSAK NO 30 tentang sewa dalam hal pengakuan awal piutang dan pengukuran. Setelah pengakuan awal yang menyatakan bahwa pengakuan awal pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal kontrak sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan secara praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman *lessee*. Biaya langsung awal yang dikeluarkan *lessee* ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Sedangkan pengukuran setelah pengakuan awal yang menyatakan bahwa *lessee* pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan

⁶⁴ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, ...hal 34

beban keuangan dan bagian yang merupakan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas.⁶⁵

4. Pengakuan Awal dan Pengukuran Piutang Bagi Pihak *Lessor*

Menurut PSAK NO 30 tentang sewa dalam hal pengakuan awal piutang dan pengukuran. Setelah pengakuan awal yang menyatakan bahwa pengakuan awal pada awal masa sewa, *lessor* dalam sewa pembiayaan, *lessor* mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa netto tersebut.

Sedangkan pengukuran setelah pengakuan awal yang menyatakan bahwa, *lessor* pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih *lessor* dalam sewa pembiayaan.⁶⁶

5. Sewa dalam Laporan Keuangan *Lessee*

a. *Capital lease*

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika

⁶⁵ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, ...hal. 30.10

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 30.15

nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan secara praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental *lessee*. Biaya langsung awal dikeluarkan *lessee* ditambahkan kedalam jumlah yang diakui asset.

Ayat jurnal untuk mencatat awal perjanjian:

Aset <i>lease</i>	xxx	
Utang <i>lease</i>		xxx

b. *Operating lease*

Pengakuan awal: Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna.⁶⁷

Ayat jurnal untuk mencatat pengakuan awal:

Beban <i>lease</i>	xxx	
Cash		xxx
Hutang <i>lease</i>		xxx

6. Sewa dalam Laporan Keuangan *Lessor*

a. *Capital Lease*

Pengakuan awal: dalam sewa pembiayaan, *lessor* mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan dilaporan posisi keuangan sebesar jumlah yang

⁶⁷ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan,...hal. 31:17

sama dengan investasi sewa neto tersebut. Pengukuran setelah pengakuan: pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih *lessor* dalam sewa pembiayaan.⁶⁸

- a) *Sales Type Lease* merupakan *financial lease*, tetapi dalam hal ini *leased property* pada saat permulaan *lease* mempunyai nilai yang berbeda dengan “*cost*” yang ditanggung oleh *lessor*, yaitu adanya perbedaan antara harga pasar aktiva dengan harga perolehan nilai bukunya dan ini akan berakibat dalam perhitungan laba atau rugi.

Ayat jurnal mencatat perjanjian awal:

Piutang <i>lease</i>	Rp. xxx	
Harga pokok penjualan	Rp. xxx	
	Pendapatan penjualan	Rp. xxx
	Aktiva	Rp. xxx
	Pendapatan bunga diterima dimuka	Rp. xxx

⁶⁸ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, ...hal. 31:16

Ayat jurnal mencatat perjanjian awal:

Piutang <i>lease</i>	Rp. xxx	
Harga pokok penjualan	Rp. xxx	
Pendapatan penjualan		Rp. xxx
Aktiva		Rp. xxx
Pendapatan bunga diterima dimuka		Rp. xxx

Ayat jurnal saat penerimaan pembayaran pertama:

Kas	Rp. xxx	
Piutang <i>lease</i>		Rp. xxx

- b) *Direct Finance Lease* merupakan salah satu bentuk “*financial lease*” yang dibiayai langsung oleh *lessor*.

Ayat jurnal untuk mencatat *lease*:

Piutang <i>Lease</i>	Rp. xxx	
Aktiva		Rp. xxx

b. *Operating lease*

Lessor menyajikan aset untuk sewa operasi dilaporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dimana manfaat penggunaan aset sewaan menurun.⁶⁹

Ayat jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran pertam:

Kas	Rp. xxx	
Pendapatan sewa diterima dimuka		Rp. xxx

⁶⁹ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, ...hal. 32.17

Ayat jurnal untuk mengakui pendapatan yang diperoleh dan penyusutan aktiva:

Pendapatan sewa diterima di muka	Rp.xxx
Pendapatan sewa	Rp.xxx
Beban penyusutan	Rp.xxx
Akumulasi penyusutan	Rp.xxx

E. Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit.

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup, keadaan, keluarga, dan sebagainya. Ini semua ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Capacity dilakukan dengan cara melihat nasabah dalam hal kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis ini diukur dengan kemampuan nasabah dalam memahami dalam ketentuan-ketentuan bisnis oleh pemerintah dan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Dengan melihat *Capacity*, maka pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.⁷⁰

⁷⁰ Siska Maristiana, “Pengaruh Analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral and Condition*) dalam pemberian kredit di PT Bank BRI Unit Indraprasta”, Jurnal Akuntansi, Vol 5, No. 6, 2016, hal 2

3. *Capital*

Capital untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang dipergunakan nasabah dalam menjalankan usahanya.⁷¹

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik. Jaminannya hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan tersebut kuat untuk jaminan bagi bank atas kredit yang diberikan.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah.⁷²

⁷¹ Siska Maristiana, “Pengaruh Analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition*) dalam pemberian kredit di PT Bank BRI Unit Indraprasta”,... hal 3

⁷² Suyanto Thomas, *Dasar-Dasar Pengkreditan*, (Gramedia:Jakarta, 1990) hal. 65

F. Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian internal.⁷³ Pengendalian internal menurut laporan COSO (*Committee Of Sponsoring Organizations Of the Treadway Commission*) merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.⁷⁴

Menurut Hery sistem pengendalian Internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu keadaan pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektifitas operasi serta ketaatan pada hukum dan peraturan.⁷⁵

Pengendalian internal menurut Bambang Hartadi merupakan pengendalian internal yang dapat di pandang sebagai sistem sosial yang mempunyai wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan.

⁷³ Sulaeman, "Analisis Prosedur pengendalian Intern Piutang Usaha pada Astra Credit Companies Cabang Makasar", (Makasar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 14

⁷⁴ Arum Ardianingsih, *Audit Laporan keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2018), hal 40

⁷⁵ Hery, *Auditing 1 Dasar-dasar Pemeriksaan Akuntansi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana 2011), hal 15

Meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.⁷⁶

Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Antara sebuah tujuan dengan tujuan yang lainnya seringkali bertentangan. Sebagai contoh, perusahaan menginginkan untuk melakukan perubahan secara drastis dalam proses bisnis dengan melakukan perekrutan ulang sehingga perusahaan dapat memperoleh informasi yang lebih baik dan lebih cepat serta memperbaiki efisiensi operasi. Namun jika hal ini dilakukan, maka perusahaan akan menghadapi resiko dalam upaya melindungi atau menjaga aktiva dan diperlakukan perubahan yang signifikan dalam kebijakan manajemen.⁷⁷

Pengendalian internal adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur unsur yang ada dalam perusahaan.

Adapun tujuan perusahaan membuat pengendalian internal adalah:

- a. Untuk menjaga kekayaan perusahaan.
- b. Untuk menjaga keakuratan laporan keuangan perusahaan.

⁷⁶ Bambang Hartadi, *Auditing*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: BPFE 1987), hal 121-122

⁷⁷ Ar Rahman Syaifudin, "Evaluasi Sistem pengendalian Internal pada Prosedur Penjualan Motor Di Dealer Yamaha SIS Motor Srengat Blitar Ditinjau Dari Prespektif Islam", (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 18-19

- c. Untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan.
- d. Untuk menjaga kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen.
- e. Agar semua lapisan yang ada diperusahaan tunduk pada hukum dan aturan yang sudah ditetapkan perusahaan.⁷⁸

Menurut COSO pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan dalam proses organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. COSO (*Committee Of Sponsoring Organizations Of the Treadway Commission*) adalah sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya untuk mengidentifikasi faktor faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan untuk mengurangi kejadian tersebut. Selama ini COSO telah menyusun definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai pengendalian mereka.

2. Komponen Pengendalian

Menurut COSO ada 5 komponen dari pengendalian internal, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian (*control envionment*)

Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan pra-sarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik. Beberapa komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal adalah:

- a) Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai nilai etika (*commitment to integrity and ethical values*). Dalam perusahaan harus

⁷⁸ Sujarweni, *Sistem Akuntansi*, (Pustaka Baru Press Yogyakarta, 2015), hal.69

selalu ditanamkan etika di mana jika etika dilanggar itu merupakan penyimpangan. Contoh: datang tepat waktu adalah suatu etika yang baik, dan begitu sebaliknya.⁷⁹

b) Filosofi yang dianut manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen (*management's philosophy and operating style*), artinya disini bahwa manajemen akan selalu menegakkan aturan. Jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas.

c) Struktur organisasi (*organization structure*).

1) Komite audit dewan direksi.

Menurut peraturan semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal harus memiliki komite audit yang beranggota dari luar (non karyawan) perusahaan. Komite ini bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengawasan internal perusahaan. Salah satu tujuan dibentuknya audit ini untuk melakukan kajian ulang independen terhadap tindakan manajer untuk kepentingan pemegang saham. Kaji ulang tersebut dimaksudkan sebagai pengecekan terhadap integritas manajemen dan meningkatkan kepercayaan publik.

2) Metode pembagian tugas dan tanggung jawab (*methods of assigning authority and responsibility*). Dalam perusahaan harus jelas dan tegas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3) Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia (*human resource policies and practices*). Perusahaan dalam memilih karyawan

⁷⁹ Sujarweni, *Sistem Akuntansi*,...hal.69

harus selektif dan melalui prosedur tes yang semestinya bukan berdasarkan nepotisme dan sejenisnya.

4) Pengaruh dari luar (*external influences*). Apabila lingkungan dalam perusahaan sudah baik, maka pengaruh dari luar yang buruk akan mudah bersama-sama ditangkal dan pengaruh yang baik akan lebih mudah diterima.

5) Kegiatan pengendalian.

b. Aktivitas pengendalian. Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. COSO mengidentifikasi setidaknya ada lima hal yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu:

- a) Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan.
- b) Pembagian tugas dan tanggung jawab.
- c) Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik.
- d) Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan.
- e) Pemeriksaan independen terhadap kinerja perusahaan.

c. Penentuan Resiko.

Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami resiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Ada tiga kelompok resiko yang dihadapi perusahaan, yaitu: ⁸⁰

⁸⁰ Sujarweni, *Sistem Akuntansi*,....hal.70

- a) Resiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang salah (misalnya: harusnya dikerjakan dengan komputer ternyata dikerjakan dengan manual).
- b) Resiko finansial, yaitu resiko menghadapi kerugian keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena uang hilang, dihambur hamburkan, atau dicuri.
- c) Resiko informasi, yang menghasilkan informasi yang tidak relevan, atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem infromasinya tidak dapat dipercaya.

d. Informasi dan Komunikas

Merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hal hal dibawah ini:

- a) Bagaimana transaksi diawali.
- b) Bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap di input ke sistem komputer atau langsung di konversi ke sistem komputer.
- c) Bagaimana fail data dibaca, diorganisasi, dan diperbaharui isinya.
- d) Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan.
- e) Bagaimana informasi yang baik dilakukan.
- f) Bagimana transaksi berhasil.⁸¹

⁸¹ Sujarweni, *Sistem Akuntansi*,....hal.71

e. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera diambil tindakan. Berbagai bentuk pemantauan di dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu atau semua proses berikut ini :

- a) Supervisi yang efektif yaitu manajemen yang lebih atas mengawasi manajemen dan karyawan dibawahnya.
- b) Akuntansi pertanggungjawaban yaitu perusahaan menerapkan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, masing masing departemen, dan masing masing proses yang dijalankan oleh perusahaan.
- c) Audit internal yaitu pengauditan yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan.⁸²

3. Jenis Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang dilakukan perusahaan berupa pengawasan.

Pengawasan berdasarkan tujuanya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pengawasan Akuntansi.

Pengawasan akuntansi adalah menjamin bahwa semua transaksi yang ada di perusahaan dilaksanakan sesuai otorisasi manajemen. Transaksi sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi dan sudah sesuai dengan transaksi

⁸² Sujarweni, *Sistem Akuntansi*,....hal.70-73

yang ada. Pengawasan akuntansi juga meliputi pengawasan pada harta berwujud dan tidak berwujud. Untuk harta berwujud perlu direncanakan tempat penyimpanan yang aman, membuat catatan keluar masuk aktiva yang jelas. Untuk harta tidak berwujud yaitu dengan mematenkan hak cipta, hak logo.

b. Pengawasan manajemen.

Pengawasan manajemen dibuat untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengawasan manajemen mencakup semua departemen yang ada dalam perusahaan. Misalnya untuk mencapai visi dan misi perusahaan perlu kedisiplinan karyawan, inovasi produk, penjaminan mutu, kesemuanya itu perlu pengawasan dari manajemen secara ketat dengan cara pembuatan aturan aturan yang jelas dan aturan tersebut harus dipatuhi.⁸³

Pengawasan berdasarkan sebuah lingkungan dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pengawasan Umum.

Pengawasan umum merupakan pengawasan yang berlaku secara keseluruhan dan untuk semua lapisan, baik tingkat bawah sampai tingkat atasan. Misalnya, penerapan kedisiplinan, pemberian kode pada dokumen, setiap transaksi sekurang kurangnya melibatkan tiga karyawan pada bagian terpisah agar terhindar dari penggelapan.

b) Pengawasan Aplikasi

Pengawasan yang diterapkan pada prosedur tertentu, misalnya pengawasan pada prosedur pembelian, pengawasan pada prosedur

⁸³ Sujarweni, *Sistem Akuntansi*,....hal.74

penjualan. Pengawasan ini meliputi pengawasan dari *input* penjualan, proses, keluaran, penyimpanan dan basis datanya.

4. Penyebab Gagalnya Pengawasan

Pengawasan yang telah dilakukan oleh perusahaan sedemikian rupa ada kemungkinan gagal dilakukan, penyebab kegagalan itu diantara lain:

- a. Adanya persekongkolan antar karyawan untuk melakukan kecurangan.
- b. Pengawasan kurang ditegakkan.
- c. Tidak ada sanksi jelas bagi para pelanggar.
- d. Ada kejahatan komputer, perusahaan yang sudah menggunakan komputerisasi dalam semua pencatatannya dapat di *hack* oleh para *hacker*, yaitu orang yang dapat merubah data sehingga tidak sesuai dengan hasilnya.⁸⁴

5. Kegiatan Pengendalian Internal.

Kegiatan pengendalian internal yang baik dalam perusahaan harus memenuhi unsur unsur pokok agar tujuan suatu perusahaan dapat tercapai dengan semestinya. Kegiatan pengendalian internal terdiri dari:

- a. Adanya suatu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang tepat.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi

⁸⁴ Sujarweni, *Sistem Akuntansi*,....hal.76-78

tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur Adanya suatu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang tepat.

b. Pemisahan fungsi dan tanggung jawab secara tepat.

Di dalam pemisahan fungsi dan tanggung jawab secara tepat merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada setiap organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan masing-masing karyawan dalam operasional perusahaan.

c. Praktek yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

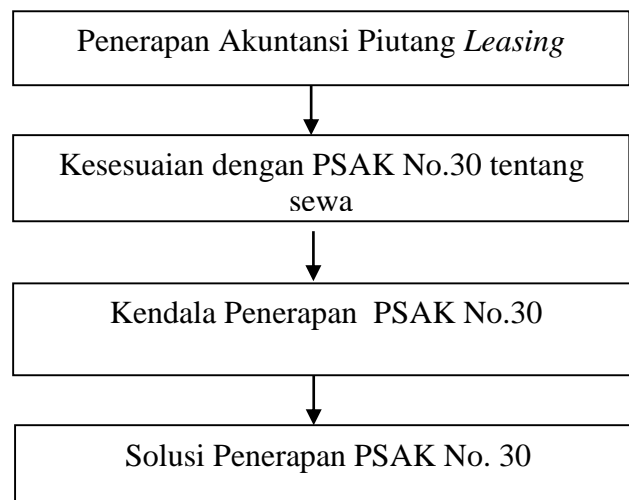
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab

Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab, untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya berbagai cara.⁸⁵

⁸⁵ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta : Salemba Empat. 2001), hal. 13

G. Rerangka Konseptual

Gambar 2.1
Rerangka Konseptual



Sumber: Data diolah Peneliti 2020

Keterangan:

Kerangka konseptual dalam penelitian ini memberikan gambaran suatu model yang menggambarkan hubungan di antara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah.⁸⁶

Jadi di dalam penelitian ini ingin mendiskripsikan bagaimana penerapan akuntansi piutang *leasing* yang ada di PT Mega Finance Cabang Blitar dalam upaya meningkatkan pengendalian internal piutang. Kemudian peneliti juga ingin mendiskripsikan kesesuaian penerapan akuntansi piutang *leasing* dengan PSAK No 30 tentang sewa yang ada di PT Mega Finance Cabang Blitar kemudian mencoba untuk mengungkap kendala-kendala apa saja yang di hadapi

⁸⁶ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2016), hal. 23

oleh PT Mega Finance Cabang Blitar dalam menerapkan PSAK No.30 terkait dengan penerapan akuntansi piutang *leasing* kemudian dari kendala tersebut ditemukan sebuah solusi dalam menghadapi kendala dalam penerapannya.

H. Penelitian Terdahulu

Runtuwene, yang bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan akuntansi piutang *leasing* Untuk Perencanaan dan Pengendalian pada PT Suzuki Finance Indonesia Cabang Manado. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hasil perhitungan dan analisis yang telah diuraikan beberapa hal yang dapat disimpulkan:(1).Penerapan akuntansi pada PT.SFI manado menggunakan model akuntansi *leasing capital lease* dengan model *direct finance lease* atau metode pembiayaan langsung. (2). Penerapan akuntansi piutang oleh PT.SFI telah sesuai dengan PSAK No.30 tentang sewa. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, terletak pada objek penelitiannya dan sama-sama meneliti tentang akuntansi piutang *leasing*. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.⁸⁷

Wulandari, yang bertujuan untuk mendiskripsikan perlakuan akuntansi *leasing* telah sesuai dengan PSAK No.30 Tahun 2012 pada PT. Adira Din amika Multi Finance Tanjungpinang. Metode penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif.Pada hasil penelitian dapat menyimpulkan: (1).PT Adira

⁸⁷ Runtuwene, "Penerapan Akuntansi Piutang Leasing Untuk Perencanaan dan Pengendalian pada PT Suzuki Finance Indonesia Cabang Manado" ,Jurnal EMBA, Vol 1, No. 1, 2013, hal. 22

Dinamika Multi Finance Tanjungpinang mengakui aset berupa piutang sewa pembayaran dalam laporan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto untuk pengukuran laporan keuangan adalah konsep pembiayaan perolehan atau lebih dikenal dengan *historicalcost* untuk pengungkapan sewa Adira Finance mengungkapkan pendapatan pada laporan laba rugi di sajikan dalam posnya masing-masing seperti pendapatan perusahaan atas pembiayaan kredit dari pihak *lease*.(2).Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa kriteria klasifikasi sewa guna usaha yang diterapkan didalam PSAK No.30 tentang sewa pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tanjungpinang merupakan suatu sewa pembiayaan (*finance lease*) dengan model *direct financing lease* atau pembiayaan secara langsung. Pada akhir masa sewa,spihak *lessee* memiliki aset sewa guna usaha yang telah dibayarkan dibayarkan setiap bulanya kepada *lessor*.(3) dari hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan akuntansi piutang telah sesuai dengan PSAK No.30 tentang sewa, yang mana dalam hal ini piutang sewa telah berjalan dengan baik, dan mengenai pengakuan, pengukuran,dan pengungkapan transaksi keuangan sudah sesuai dengan aturan PSAK No.30 tahun 2012. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama meneliti tentang akuntansi piutang *leasing*. Sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitiannya serta variabelnya.⁸⁸

Ramadhani, yang bertujuan untuk mendiskripsikan sistem pengendalian intenal atas piutang dalam meningkatkan efektifitas penerimaan kas. Penelitian ini

⁸⁸ Sugiarti,Wulandari, “Analisis Pembiayaan Melalui Finance Lease Dan Aplikasi Perlakuan Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK No.30 Tahun 2012 Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tanjungpinang”, Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 2, 2016, hal. 4

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan hasil ini menyatakan bahwa hasil perhitungan dan analisis telah diuraikan beberapa hal yang dapat disimpulkan:(1) Jadi didalam metode yang digunakan dalam pencatatan piutang pada PT Balantara sinergies Multifinance menggunakan metode analisis umur piutang dimana metode ini bisa dikatakan sudah cukup baik dikarenakan bisa menunjukkan jumlah piutang yang akan dapat ditagih sesuai dengan keadaanya.(2) Dan perusahaan disini juga sudah melakukannya sistem pengendalian internal atas piutangnya secara baik alhasil dapat dibuktikan dengan munculnya pemisah fungsi ataupun tanggung jawab secara sesuai, dan secara umum bisa dikatakan sistem pengendalian internal yang tentunya diterapkan pada perusahaan tersebut cukup dikatakan efektif. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti ialah terletak pada metode penelitiannya sedangkan perbedaannya terletak pada variabel dan lokasi penelitiannya.⁸⁹

Alipudin, yang bertujuan untuk mendiskripsikan untuk mengetahui perlakuan akuntansi sewa. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa:(1) Perlakuan akuntansi yang diterapkan PT BFI Finance Indonesia, Tbk. atas aset yang diperoleh melalui kegiatan pembiayaan adalah dengan menggunakan metode sewa pembiayaan (*capital lease*) dan di depresiasi dengan metode garis lurus atau *straight line method*. Pada saat perjanjian *leasing* pembayaran uang muka sebagai simpanan jaminan, perusahaan mencatatnya pada kelompok aset lancar, sehingga di laporan posisi keuangan jumlah aset lancar lebih besar dari yang sebenarnya.(2) Pencatatan

⁸⁹ Dali dan Ramdhani, "Analisis Sistem Pengendalian atas Piutang dalam Meningkatkan Efektifitas Penerimaan Kas pada PT Bentara Sinergis Multifinance", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol.4, No. 3, 2015, hal. 32

atas biaya bunga yang dibayar oleh *lessee* selama masa sewa ditentukan atas dasar nilai yang tetap untuk setiap periode yang diperhitungkan terhadap jumlah pembayaran sewa minimum dalam tahun yang bersangkutan. Pembebanan bunga dengan tingkat bunga tetap mengabaikan adanya “*time value of money*” yaitu nilai uang pada saat sekarang yang lebih tinggi dari pada masa yang akan datang dan perlakuan ini menyimpang.(3) Terdapat perbandingan antara perlakuan akuntansi sewa yang diterapkan oleh perusahaan dengan perlakuan akuntansi menurut PSAK NO.30. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penelitian adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama sama meneliti tentang pengendalian internal. Sedangkan perbedaanya terletak pada variabel dan lokasi penelitiannya.⁹⁰

Tulangow, yang bertujuan untuk mendiskripsikan Penerapan Psak No.30 Mengenai Perlakuan Akuntansi Sewa Dan Pengaruhnya Pada Laporan Keuangan PT. Bfi Finance Indonesia Tbk. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa:(1)Penerapan Akuntansi PT.Astra Sedaya Finance Manado menggunakan model akuntansi *Financial lease* dengan metode pembiayaan langsung.(2) Berdasarkan aspek pengakuan dan pencatatan, diakhir periode *lease* diakui adanya pengalihan kepemilikan, menunjukkan sistem *financial lease* diberlakukan dalam sistem akuntansi PT. Astra Sedaya Finance (3) Berdasarkan aspek pelaporan akuntansi *leasing* pada PT Astra Sedaya Finance dicatat sesuai dengan PSAK yang berlaku(4).Berdasarkan aspek pengungkapan catatan atas laporan keuangan PT.

⁹⁰ Alipudin dan Ningsi, “Penerapan Psak No.30 Mengenai Perlakuan Akuntansi Sewa Dan Pengaruhnya Pada Laporan Keuangan PT. Bfi Finance Indonesia Tbk”, Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi , Vol 1 No.2, 2015, hal. 21

Astra Sedaya Finance telah membuat catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama meneliti tentang akuntansi piutang *leasing*. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya serta variabelnya.⁹¹

Wijaya, yang bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi sistem pengendalian internal dalam mengurangi kredit bermasalah pada Koperasi Unit Desa Mambal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mengunjungi kembali konsumen, di samping itu evaluasi juga dilakukan bagi petugas kredit, bahwa Keadaan yang dialami maupun yang dilakukan oleh debitur dapat mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah dengan adanya kendala tersebut harus bertindak cepat untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah tersebut, Evaluasi sistem pengendalian internal dalam upaya mengurangi kredit bermasalah secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, jika ada salah satu dari kelima aspek tersebut tidak terpenuhi maka kredit bisa dipastikan tidak dapat dicairkan, meskipun barang jaminan debitur bernilai tinggi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama meneliti tentang pengendalian internal. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.⁹²

⁹¹ Tulangow, "Evaluasi Penerapan Akuntansi Piutang *leasing* dan pelaporannya Pada PT.Astra Sedaya finance di Manado", Jurnal Akuntansi, Vol 1 No.2, 2015, hal. 7

⁹² Wijaya dkk, "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Mengurangi Kredit Bermasalah Pada Koperasi Unit Desa Mambal", Jurnal Akuntansi Program S1, Vol. 8, No.2, 2017, hal. 23

Alexander. yang bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan akuntansi *leasing* yang diterapkan PT. Federal Internasional Finance (FIF) dan untuk mengetahui penerapan akuntansi *leasing* apakah sudah sesuai dengan PSAK No.30 Tahun 2011 tentang Sewa. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi *leasing* yang diterapkan, sesuai dengan dengan PSAK No.30 Tahun 2011 tentang Sewa Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam surat kontrak lease pada perusahaan tersebut, yang menyatakan adanya hak opsi bagi pihak *lease* pada saat berakhirnya masa *lease*, dimana ketentuan tergolong dalam salah satu kriteria yang ada pada kapital *lease*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama sama meneliti tentang akuntansi piutang *leasing*. Perbedaanya terletak pada lokasi penelitiannya serta variabelnya.⁹³

Endang, yang bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada PT Sumber Purnam Sakti Motor dalam upaya mendukung peningkatan pengendalian *intern* yang baik. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian:(1) Penerapan sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang dilakukan oleh PT Sumber Purnama Sakti Motor Lamongan secara keseluruhan sudah baik. hal ini dikarenakan fungsi-fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, informasi yang diperlukan, dan prosedur dari sistem penjualan dan penerimaan kas yang sudah berjalan dengan baik dan memadai. (2) Upaya peningkatan

⁹³ Setiawan dan Alexander, "Analisis Penerapan Akuntansi *leasing* Pada PT.Federal International Finance Manado", Jurnal EMBA, Vol 3 No.2,2015, hal. 43

pengendalian internal yang dilakukan oleh PT Sumber Purnama Sakti Motor Lamongan sudah membaik. Pengendalian internal-nya sudah memenuhi empat unsur pengendalian internal yaitu , sistem otorisasi, prosedur pencatatan, praktek yang sehat, dan karyawan yang cakap. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama sama meneliti tentang akuntansi piutang *leasing*. Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian.⁹⁴

Endang, yang bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada PT Mega Finance cabang Palembang serta tindakan-tindakan yang diambil Mega Finance dalam mengatasi penanganan kredit bermasalah. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan kesalahan yang terjadi dalam penilaian awal yaitu kurangnya memperhatikan riwayat kredit nasabah sebelumnya, kurang teliti dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam mengangsur kreditnya. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama sama meneliti tentang akuntansi piutang *leasing*. Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian.⁹⁵

Heince, yang bertujuan untuk mendeskripsikan Penerapan PSAK No.30 (Revisi 2011) Atas Akuntansi *Leasing* Pada PT. Federal International Finance (Fif) Cabang Manado Multifinance. Metode penelitian ini menggunakan metode

⁹⁴ Baharani, “Analisis Sistem Akuntansi Penjualan Dan Penerimaan Kas Dalam Upaya Peningkatan Pengendalian Intern (Studi Pada PT Sumber Purnama Sakti Motor Lamongan)”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 53 No.1, 2017, hal. 31

⁹⁵ Endang, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Perusahaan Pembiayaan PT Mega Finance Cabang Palembang)”, Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu, Vol. 1, No. 1 September 2014, hal. 62

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dalam penerapan PSAK 30 (Revisi 2011) atas akuntansi *leasing* oleh PT. *Federal International Finance* Cabang Manado (FIF) telah sesuai dengan standar yang berlaku. PT. FIF menggunakan model akuntansi *leasing capital lease*, dapat diketahui dari ketentuan dalam surat *lease* pada perusahaan tersebut, yang menyatakan adanya hak opsi bagi pihak *lease* pada saat berakhirnya masa *lease*. Dalam *capital lease* dimasa akhir pembayaran sewa, hak opsi kepemilikan kendaraan bagi *lease*. PT. FIF menggunakan model akuntansi *leasing capital lease* dengan model *direct financing lease* atau metode pembiayaan langsung Dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sewa pembiayaan PT. FIF telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku karena sewa pembiayaan diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama sama meneliti tentang akuntansi *leasing*, penerapan PSAK No.30 dan Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian.⁹⁶

⁹⁶ Yusni Husain, “Analisis Penerapan PSAK No.30 (Revisi 2011) Atas Akuntansi Leasing Pada PT. *Federal International Finance (FIF) Cabang Manado Multifinance*”, Jurnal Akuntansi, Vol.5, No. 3, 2016, hal. 24

